
ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA CUPAK MELALUI VALUE FOR MONEY

Oleh

Cholis Hidayati¹, Maulidah Narastri², Qhuluqi Alya³, Nisa Fitri Aulia⁴, Rikhza Masfa'ani⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: ¹cholishidayati@untag-sby.ac.id, ²maulidah@untag-sby.ac.id,

³qhuluqialya2@gmail.com, ⁴nisaftra88@gmail.com, ⁵rikhzamasfaani@gmail.com

Article History:

Received: 30-09-2023

Revised: 06-10-2023

Accepted: 02-11-2023

Keywords:

Tingkat Kemandirian, Value for Money, Desa Cupak Jombang

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja pemerintah desa Cupak melalui analisis value for money. Nilai uang mencakup efisiensi, efektivitas dan ekonomi. Desa memerlukan sumber pendapatan untuk mengatur kewenangannya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pendapatan desa merupakan total pendapatan sehari-hari yang sangat penting bagi pemerintah desa. Dapat dikatakan bahwa value for money merupakan inti pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah, berdasarkan tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari observasi langsung dan wawancara dengan informan penelitian. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan pemerintah desa. Hasil yang diharapkan adalah pemerintah dapat berfungsi secara ideal dalam hal efisiensi, efektivitas dan perekonomian.

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia. Desa merupakan pemerintahan yang paling mudah diakses oleh masyarakat dalam hal pemberian pelayanan publik, persyaratan hukum, dan kebijakan publik karena mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat adat. Desa membutuhkan pendapatan untuk mengatur kewenangannya dalam menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Pendapatan desa merupakan total pendapatan sehari-hari yang sangat penting bagi pemerintah desa. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah persoalan pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah. Kinerja keuangan pemerintahan desa adalah kemampuan desa dalam menemukan, mengelola, dan memanfaatkan potensi keuangan utama yang dimilikinya untuk menunjang penyelenggaraan sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan Desa agar desa tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. pemerintah pusat dan memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat desa

dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tercipta kinerja keuangan desa yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat desa setempat secara ekonomis, efisien, transparan dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip co-value uang.

Kami mengantisipasi bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita akan dapat memberikan dampak positif pada cakupan yang lebih luas dalam membangun perbaikan dan ketahanan. *alue for money* dapat dianggap sebagai aspek penting untuk mengukur kinerja pemerintah berdasarkan tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, kawasan pegunungan Pucangan dengan luas desa sekitar 72 hektar, jumlah penduduk sekitar 1.026 jiwa, 385 KK dan tersebar di 3 (tiga) desa. yaitu: Cupak, Asemgede dan Kromo. Hingga tahun 2016, Kecamatan Ngusikan memiliki 11 wilayah desa dan merupakan kecamatan paling terpencil, berjarak 26 km dari kota Jombang. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah kemandirian desa dalam pengelolaan keuangan melalui optimalisasi sumber daya.

Peran pemerintah dalam perekonomian adalah untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mendorong kesetaraan. Intervensi atau peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan perekonomian daerah tercermin dalam anggaran belanja masyarakat/daerah. Jhingan (2008: 388) berpendapat bahwa peran belanja pemerintah/publik adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan standar hidup, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan, serta mendorong inisiatif swasta dan perusahaan serta mendorong tercapainya kesejahteraan dan keseimbangan regional dalam perekonomian.

Pemerintah Desa Cupak melalui belanja daerah terus melakukan pengembangan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa. Komitmen Pemerintah Desa Cupak dalam meningkatkan perekonomian daerah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah APBD.

Pembangunan perekonomian daerah telah menjadi salah satu tugas pokok pembangunan daerah. Pemerintah desa Cupak mempunyai kriteria untuk mengukur keberhasilan pencapaian anggaran pembangunan ekonomi daerahnya. Standar tersebut meningkatkan pertumbuhan PDRB dan meningkatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah.

Adanya kriteria yang meningkatkan pertumbuhan PDB berarti perlu dilakukan analisis tingkat kemandirian keuangan pemerintah desa Cupak melalui optimalisasi sumber daya sehingga dapat berkontribusi dalam mendorong pembangunan desa.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik

dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba) (Biduri, 2018)

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Bidang akuntansi sektor publik dapat dikatakan sebagai suatu bidang studi akuntansi yang mandiri, di samping studi akuntansi keuangan, studi akuntansi manajemen, studi sistem informasi akuntansi, dan studi pemeriksaan akuntan (Bastian, 2010).

Akuntansi sektor publik juga merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Organisasi publik dalam bidang sektor publik dapat berfokus pada peningkatan pelayanan berjangka panjang. Dengan kata lain, dampak pelayanan menuju kualitas kehidupan generasi berikut amat diperhatikan, seperti penyediaan infrastruktur dan alokasi dana publik. Di sektor publik, kebutuhan akan informasi keuangan semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga publik.

Laporan keuangan sektor publik menjadi instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk memenuhi kebutuhan ini dimunculkanlah akuntansi keuangan sektor publik yang merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi.

Value for Money

Value for Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for Money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.

Ekonomi terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Rumus untuk menghitung ekonomis adalah $(\text{input}/\text{harga input}) \times 100\%$

Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah menunjukkan efisiensi. Rumus untuk menghitung efisiensi adalah $(\text{output}/\text{input}) \times 100\%$

Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rumus untuk menghitung efektivitas adalah: $\text{outcome atau realisasi pendapatan}/\text{output} \times 100\%$.

Terdapat 3 faktor utama yang dapat mendorong peningkatan Value for Money, yaitu:

1) Alokasi risiko. Adanya alokasi risiko dalam skema pengadaan PPP, adalah faktor utama yang menjadikan PPP memiliki VfM lebih tinggi dari pengadaan konvensional. Nilai VfM akan bertambah tinggi apabila biaya risiko dialokasikan dengan tepat antara Pemerintah dan Swasta; 2) Spesifikasi output. Pihak swasta diyakini memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik untuk melakukan inovasi dalam rangka mencapai spesifikasi output, sehingga dengan inovasi tersebut spesifikasi output dapat dicapai dengan biaya

yang lebih efisien; 3) Kontrak berbasis kinerja. Kinerja dalam PPP berfokus pada kualitas pelayanan di masa operasi dan bukan pada target penyelesaian konstruksi seperti di pengadaan konvensional. Dengan adanya mekanisme berbasis kinerja, Swasta diberi insentif untuk mempertahankan kualitas kinerja mereka selama masa konsesi dan dengan demikian meningkatkan VfM.

Terdapat 2 metode analisis VfM, yaitu: (1) metode VfM kualitatif dan (2) metode VfM kuantitatif. Pada tahap penyiapan, analisis VfM yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif. Metode analisis VfM kuantitatif bertujuan membandingkan VfM PPP dengan pengadaan konvensional dengan cara menghitung selisih total biaya yang muncul selama periode proyek, termasuk biaya konstruksi dan biaya operasi.

Manfaat Analisis Value for Money

Pertama, Implementasi analisis Value for Money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep Value for Money pada organisasi sektor publik antara lain sebagai berikut ini; Kedua, Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; Ketiga, Meningkatkan mutu pelayanan public; Keempat, Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Kelima, Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik bukan golongan atau kelompok tertentu, dan Keenam, Meningkatkan kesadaran akan dana publik (public cost awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas public.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari observasi dan wawancara langsung kepada informan penelitian. data sekunder berasal dari laporan keuangan pemerintah desa. Informan yang direncanakan setidaknya ada 2, yaitu kepala desa dan kepala bidang pemerintah. Metode pengolahan data yang direncanakan adalah transkrip atau pencatatan yang disertai perekaman, kemudian data yang didapatkan ditriangulasi, triangulasi merupakan proses crosscheck antara informan untuk mendapatkan informasi yang valid. Kemudian yang terakhir adalah reduksi data. Reduksi digunakan untuk memilih informasi yang relevan dan tidak relevan dalam sebuah penelitian, sehingga pada akhirnya bisa ditarik sebuah kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Standar Penilaian
Skala

No.	Persentase	Penilaian
1	90 sd 100	Sangat ekonomi/ sangat efisien/ sangat efektif
2	80 sd 89,99	Cukup ekonomi/ cukup efisien/ cukup efektif
3	70 sd 79,99	Ekonomi/ efisien/ efektif
4	60 sd 69,99	Kurang ekonomi/ kurang efisien/ kurang efektif
5	< 59,99	Tidak ekonomi/ tidak efisien/ tidak efektif

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, didapat hasil sebagai berikut:

A. Ekonomis			
Tahun	Input (Realisasi Anggaran)	Harga Input (Anggaran)	Prosentase
2021	-Rp7.626.711,97	-Rp7.626.711,97	
2022	-Rp97.091.934,33	-Rp99.091.934,33	
Rasio Ekonomis	Input	x 100%	
	Harga Input		
2021	-Rp7.626.711,97	x 100%	100,00%
	-Rp7.626.711,97		
2022	-Rp97.091.934,33	x 100%	97,98%
	-Rp99.091.934,33		

Berdasarkan penghitungan rumus ekonomis, didapat presentase pada tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini berarti kinerja pemerintah desa masuk dalam kategori sangat ekonomis. Begitu juga dengan tahun 2022, didapat hasil sebesar 97,98%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah desa masuk dalam kategori sangat ekonomis. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pekerjaan dengan sangat baik dan menjalankan alokasi dana sebagaimana mestinya.

B. Efisiensi			
Tahun	Input (Realisasi Anggaran)	Harga Input (Anggaran)	Prosentase
Rasio Efisiensi	Output	x 100%	
	Input		
2021	Rp1.533.814.400,00	x 100%	94,37%
	Rp1.625.279.622,36		
2022	Rp1.673.304.350,00	x 100%	102,59%
	Rp1.631.023.271,00		

Berdasarkan penghitungan rumus efisiensi, didapat presentase pada tahun 2021 sebesar 94,37%. Hal ini berarti kinerja pemerintah desa masuk dalam kategori sangat efisien. Begitu juga dengan tahun 2022, didapat hasil sebesar 102,59% Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah desa masuk dalam kategori sangat efisien. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pekerjaan dengan sangat baik dan menjalankan alokasi dana sebagaimana mestinya.

C. Efektivitas			
Tahun	Outcome (Realisasi Pendapatan)	Output (Anggaran Pendapatan)	Presentase
2021	Rp1.625.279.622,36	Rp1.628.291.000,00	
2022	Rp1.631.023.271,00	Rp1.634.169.500,00	
Rasio Efektivitas	Outcome	x 100%	
	Output		
2021	Rp1.625.279.622,36	x 100%	99,82%
	Rp1.628.291.000,00		
2022	Rp1.631.023.271,00	x 100%	99,81%
	Rp1.634.169.500,00		

Berdasarkan penghitungan rumus efektivitas, didapat presentase pada tahun 2021 sebesar 99,82%. Hal ini berarti kinerja pemerintah desa masuk dalam kategori sangat efektif. Begitu juga dengan tahun 2022, didapat hasil sebesar 99,81% Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah desa masuk dalam kategori sangat efektif. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pekerjaan dengan sangat baik dan menjalankan alokasi dana sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Tiga rumus value for money atau yang lebih dikenal dengan 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) yang diukur dan diterapkan dalam penghitungan anggaran dan realisasi desa Cupak, sudah dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya prosentase lebih dari 90% pada ketiga rumus tersebut.

Berdasarkan penghitungan rumus 3E, didapat presentase pada tahun 2021 sebesar lebih dari 90% Hal ini berarti kinerja pemerintah desa masuk dalam kategori sangat ekonomis, efektif, dan efisien. Begitu juga dengan tahun 2022, didapat hasil sebesar lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah desa masuk dalam kategori sangat ekonomis, efektif, dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pekerjaan dengan sangat baik dan menjalankan alokasi dana sebagaimana mestinya.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih pada institusi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkarya, serta mengucapkan terima kasih pada tim pengusul yang sudah bekerja sama dalam membuat artikel ilmiah dalam bidang penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Fadillah, R. M., Hudzafidah, K., & Haidiputri, T. A. N. (2023). Analisis Metode Value For Money Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Probolinggo. *JUMAD: Journal Management, Accounting, & Digital Business*, 1(2), 161-170.
- [2]. Haryadi, A., Rokhmawati, A., & Indrawati, N. (2022). Analisis Value for Money pada Evaluasi Kelayakan Investasi Infrastruktur Publik Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru (KPBU SPAM Kota Pekanbaru). *Jurnal Daya Saing*, 8(3), 369-383.
- [3]. Yuliyanto, W., Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan Value For Money Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas X di Sektor Publik. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 233-245.
- [4]. Zendania, A., & Setyani, K. (2022). Time value of money dan economic value of time. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(5), 2419-2426.
- [5]. Nurafifah, I. P., Haliah, H., & Nirwana, N. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 56-71.
- [6]. Saragih, A. W. Analisis Value For Money Terhadap Pengukuran Kinerja Pada Kecamatan Stabat.
- [7]. Bima, V., Sinaga, I., & Akadiati, V. A. P. (2022). Analisa Transparansi APBDdes Sebelum Dan Saat Pandemi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(1), 80-88.
- [8]. SAPUTRA, A. (2023). *ANALISA TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK ITIL V3 DOMAIN SERVICE OPERATION (STUDI KASUS: RS MITRA HUSADA)* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Jakarta).
- [9]. Wahyuni, S., Sartika, D., & Mulyani, F. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Menggunakan Metode Value For Money (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 326-334.
- [10]. Nirawati, L., Samsudin, A., Clarinta, L. K., Setiawan, A. T., & Ahamd, H. (2022). Analisis konsep time value of money pandangan kajian ekonomi Islam mengenai pinjaman uang pada bank konvensional. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 44-49.
- [11]. Ardhianto, K. A., Mansur, M., & Wahono, B. (2022). Pengaruh Analisa Teknikal, Analisa Fundamental, Analisa Bandarmology Terhadap Profit Investor (Studi Kasus Saham Jakarta Islamic index Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 11(04).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN